

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya bekerjasama dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan membentuk pola kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan perkembangan dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah<sup>1</sup>. Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan produktivitas. Untuk mengukur sejauh mana kegiatan ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat, maka indikator pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu yang tepat.

Menurut Pratama pertumbuhan ekonomi memegang peranan penting bagi kemajuan sebuah negara<sup>2</sup>. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan produksi dari hasil pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan memerlukan sumber daya manusia sebagai faktor pendukung dalam proses produksi. Sehingga, terjadi peningkatan kesempatan kerja. Adanya peningkatan kesempatan kerja akan memperluas kesempatan masyarakat setempat untuk bekerja dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata.

---

<sup>1</sup> Ahmad Sukri, dkk, *Konsep, Teori, Dimensi, dan Isu Pembangunan (Malaysia : Universiti Teknologi Malaysia, 2003)*, h.179

<sup>2</sup> Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro : Suatu Pengantar* (Jakarta: FE UI, 2004)

Pertumbuhan ekonomi yang rendah dan berangsur lama, akan membuat suatu kegiatan perekonomian mengalami stagnasi dan berdampak pada buruknya kesejahteraan masyarakat. Kondisi perlambatan ekonomi dampaknya juga dirasakan hampir semua sektor usaha di Indonesia. Namun yang paling merasakan dampak dari lambatnya pertumbuhan ekonomi ini adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat<sup>3</sup>. Perlambatan ekonomi juga dapat mempengaruhi sektor perbankan salah satunya adalah berdampak pada kemampuan membayar hutang debitur yakni rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) nasabah<sup>4</sup>.

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Menurut Bank Indonesia, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi/usaha pada suatu daerah<sup>5</sup>. Apabila pertambahan PDRB besar, maka laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut meningkat dan sebaliknya pertambahan PDRB yang kecil akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Menurut Sadono Sukirno tingkat perkembangan PDRB per kapita yang dicapai masyarakat sering kali sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam menciptakan pembangunan ekonomi<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup>Lani Puji Astuti, *Sektor yang paling terkena dampak perlambatan ekonomi* ([https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2998764/ini-sektor-yang-paling-terkena-dampak-perlambatan-ekonomi\\_diakses](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/2998764/ini-sektor-yang-paling-terkena-dampak-perlambatan-ekonomi_diakses) pada tanggal 30 Juli 2017)

<sup>4</sup>Novita Sari, *Dampak Perlambatan Ekonomi Terhadap Perbankan* ([http://finansial.bisnis.com/read/20150116/90/391475/ini-dampak-perlambatan-ekonomi-terhadap-perbankan\\_diakses](http://finansial.bisnis.com/read/20150116/90/391475/ini-dampak-perlambatan-ekonomi-terhadap-perbankan_diakses) pada tanggal 30 Juli 2017)

<sup>5</sup>Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/id/statistik/metadata/sekda/Documents/8PDRBSEKDA1.pdf>\_diakses pada tanggal 12 Desember 2017)

<sup>6</sup>Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro ekonomi* (Jakarta : LPFE UI, 1981), h.23

Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 sebesar 4,79 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 lebih lambat jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 5,02 persen. Kepala BPS mengatakan bahwa laporan tersebut berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 11.540,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 45,2 juta atau US\$ 3.377,1<sup>7</sup>.

Menurut BPS, salah satu provinsi yang pertumbuhannya rendah adalah provinsi Kalimantan Selatan<sup>8</sup>. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan mengatakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan menurun. Turunnya pertumbuhan ekonomi tersebut, salah satunya disebabkan dari masih terbatasnya pertumbuhan konsumsi pemerintah pusat dan daerah. Rendahnya belanja pemerintah tersebut, dikarenakan banyak proyek yang masih dalam proses lelang dan lainnya<sup>9</sup>.

Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional terutama sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Selain itu, industri non migas juga cukup berkembang. Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki komoditas utama kelapa sawit dan karet. Menurut data BPS tahun 2013, kontribusi PDRB Kalimantan Selatan

---

<sup>7</sup>Wisnu Agung Prasetyo, *BPS: Ekonomi 2015 Tumbuh 4,79 Persen* (<https://m.tempo.co/read/news/2016/02/05/090742535/bps-ekonomi-2015-tumbuh-4-79-persen> diakses pada tanggal 30 Juli 2017)

<sup>8</sup>Delapan Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Terendah 2015 (<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/05/8-provinsi-dengan-pertumbuhan-ekonomi-terendah-2015> diakses pada tanggal 30 Juli 2017)

<sup>9</sup>Ulul maskuriah, *Pertumbuhan Ekonomi Kalsel Turun* (<http://www.antarakalsel.com/berita/36806/pertumbuhan-ekonomi-kalsel-turun> diakses pada tanggal 27 Juli 2017)

terhadap output wilayah Kalimantan sebesar 12,13 persen, dan berkontribusi terhadap pembentukan PDB nasional sebesar 1,13 persen.<sup>10</sup>

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Selatan selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2011-2015, dikarenakan harga dan permintaan komoditi unggulan batu bara mengalami penurunan. Menurunnya kinerja perekonomian provinsi Kalimantan Selatan berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan dan terganggunya kegiatan pembangunan.<sup>11</sup> Walikota Banjarmasin menyatakan bahwa menurunnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dikarenakan jatuhnya komoditi andalan Kalimantan Selatan seperti batubara, sawit dan karet. Dampaknya mulai terasa pada tahun 2014<sup>12</sup>.

**Tabel 1.1**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Selatan**

Wilayah Kalimantan Selatan	Laju PDRB (Persen )					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Provinsi Kalsel	5,59	6,97	5,97	5,33	4,84	3,83

Sumber : bps prov.kalsel

Selama tahun 2010-2015 laju pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami penurunan, namun pada tahun 2011 sempat adanya kenaikan sebesar 1,38%, namun pada tahun sesudahnya hingga tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB terus menurun mencapai 3.83 persen. Jika dihitung akumulasi penurunan laju

<sup>10</sup>“Perkembangan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2014”, *Seri Analisa Pembangunan Daerah*, Desember 2014

<sup>11</sup> Denny Susanto, Ketika Kekayaan Tambang tidak Bisa Diandalkan ([http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/61676/ketika-kekayaan-tambang-tidak-bisa-diandalkan/2016-08-16\\_diakses](http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/61676/ketika-kekayaan-tambang-tidak-bisa-diandalkan/2016-08-16_diakses) pada tanggal 4 Desember 2017)

<sup>12</sup>*Ekonomi Banjarmasin anjlok 4.93 persen* (<http://kalsel.prokal.co/read/news/2446-ekonomi-banjarmasin-anjlok-493-persen.html>\_diakses pada tanggal 27 Juli 2017)

pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan mengalami penurunan sebesar 3.14 persen. Laju pertumbuhan PDRB yang terus menurun dikhawatirkan akan menurunkan nilai output yang dihasilkan, serta dalam jangka panjang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan manusia merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur kualitas sumber daya manusia, United Nations Development Program (UNDP) menggunakan konsep yang dikenal dengan nama Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Irham Iskandar menyatakan bahwa indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi<sup>13</sup>.

IPM provinsi Kalimantan Selatan tergolong rendah. Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Kalimantan Selatan mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan yang kini berada di urutan ke-26 dari 33 provinsi lainnya di Indonesia. IPM provinsi Kalimantan Selatan yang rendah dikarenakan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat yang diukur dengan Angka Harapan Hidup yang hanya mencapai angka 63 tahun. Nilai tersebut jauh jika dibandingkan Angka Harapan Hidup Kalimantan Tengah yang mencapai 72 tahun dan Kalimantan Timur 73 tahun. Sementara Angka Harapan Hidup Nasional mencapai 75 tahun<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup>Irham Iskandar, "Effect of Human Development Index Fund on Economic Growth Through a Special Autonomy", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 18, No.1, Mei 2016

<sup>14</sup>Ulul Maskuriah, *op.cit*

**Tabel 1.2**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Wilayah Kalimantan Selatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Provinsi Kalimantan Selatan	65,20	65,89	66.68	67.17	67.63	68.38

Sumber : bps prov kalsel

Data tersebut menggambarkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Tahun 2010 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Kalimantan Selatan mencapai 65,20. Tahun 2011 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Kalimantan Selatan meningkat sebesar 0,69. Sedangkan pada tahun 2012 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan sebesar 66.68. Tahun 2013-2014 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan kembali meningkat sebesar 67.17 dan 67.63. Tahun 2015 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Kalimantan Selatan meningkat sebesar 0.75. Setiap tahunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Kalimantan Selatan meningkat, namun secara nasional masih di bawah rata-rata.

Selain itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pengangguran. Pengangguran menjadi salah satu masalah bagi seluruh Negara. Tingkat pengangguran yang tinggi, akan mengganggu stabilitas perekonomian suatu Negara. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunday Esiri Akiri

menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi<sup>15</sup>. Gubernur Kalimantan Selatan mengungkapkan, angka pengangguran di provinsinya relatif masih tinggi, dan kualitas tenaga kerja serta penciptaan kesempatan kerja masih rendah<sup>16</sup>.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Pengangguran (Jiwa)**

Wilayah Kalimantan Selatan	Jumlah Penduduk Pengangguran (Jiwa)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Provinsi Kalimantan Selatan	96.674	117.209	99.679	69.537	73.767	97.748

Sumber : bps prov kalsel

Data tersebut menggambarkan jumlah pengangguran di provinsi Kalimantan Selatan berfluktuasi. Tahun 2010 jumlah pengangguran mencapai 96.674 jiwa. Tahun 2011 jumlah pengangguran meningkat sebesar 20.535 jiwa, sementara tahun 2012 jumlah pengangguran menurun sebesar 17.530 jiwa. Tahun 2013 jumlah pengangguran kembali menurun sebesar 30.142 jiwa. Namun pada tahun 2014, jumlah pengangguran di provinsi Kalimantan Selatan meningkat sebesar 4.230 jiwa. Tahun 2015 jumlah pengangguran juga meningkat sebesar 23.981 jiwa menjadi 97.748 jiwa.

Tingkat pertumbuhan ekonomi juga disebabkan oleh minimnya realisasi dana dari pemerintah yang dapat mendorong perekonomian suatu wilayah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Chude, Nkiru Patricia dan Chude, Daniel

<sup>15</sup>Sunday Esiri Akiri” Impact Of Graduate Unemployment On The Economic Growth Of The Nigerian Economy (1980 – 2014)”, *International Journal of Advanced Academic Research* , Vol. 2, Issue 3, March 2016

<sup>16</sup>Syamsuddin Hassan, *Gubernur : Angka Pengangguran Di Kalsel Masih Tinggi*, ([http:// kalsel. Antaranews.com/berita/18999/gubernur-angka-pengangguran-di-kalsel-masih-tinggi\\_diakses pada tanggal 27 Juli 2017](http://kalsel.antaranews.com/berita/18999/gubernur-angka-pengangguran-di-kalsel-masih-tinggi_diakses_pada_tanggal_27_Juli_2017))

Izuchukwu menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi<sup>17</sup>.

Berdasarkan data dari Kemendagri<sup>18</sup>, Pemprov Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan realisasi serapan anggaran terendah kedua di Kalimantan. Kalimantan Selatan kalah dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang realisasinya sudah di atas rata-rata realisasi nasional. Kalimantan Selatan hanya berada di atas provinsi baru, Kalimantan Utara. Realisasi serapan APBD Kalimantan Selatan baru mencapai 38% per 31 Agustus 2015. Angka tersebut berada di bawah rata-rata nasional. Total APBD Kalimantan Selatan mencapai Rp 5,2 triliun. Namun, realisasinya mencapai Rp1,9 triliun. Bila realisasi APBD-nya masih rendah maka akan mempengaruhi kondisi perekonomian dan pembangunan.

**Table 1.4**  
**Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan**

Wilayah Kalimantan Selatan	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (rupiah)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Provinsi Kalimantan Selatan	8.405.905.327	10.459.350.376	12.899.337.143	15.640.199.590	17.328.280.910	19.527.741.126

Sumber : bps prov Kalsel

Data tersebut menggambarkan bahwa Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan terus bertambah di setiap tahunnya.

<sup>17</sup>Chude, Nkiru Patricia dan Chude, Daniel Izuchukwu, "Impact Of Government Expenditure On Economic Growth In Nigeria", *International Journal of Business and Management Review* Vol.1, No.4, pp.64-71, December 2013

<sup>18</sup>APBD Kalsel Baru Terserap 1,9 Triliun,( [http://www.borneonews.co.id/berita/21509-apbd-kalsel-baru-terserap-rp1-9-triliun\\_diakses\\_pada\\_tanggal\\_30\\_Juli\\_2017](http://www.borneonews.co.id/berita/21509-apbd-kalsel-baru-terserap-rp1-9-triliun_diakses_pada_tanggal_30_Juli_2017))



Tahun 2010 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan sebesar Rp 8.405.905.327,00. Tahun 2011 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan sebesar Rp 10.459.350.376,00. Tahun 2012 realisasi Pengeluaran Pemerintah meningkat sebesar Rp 2.439.987.367,00 dan tahun 2013 kembali meningkat sebesar Rp 2.740.862.447,00. Sementara itu, tahun 2014 Realisasi Pengeluaran Pemerintah meningkat menjadi Rp 17.328.280.910,00. Tahun 2015 Realisasi Pengeluaran Pemerintah meningkat sebesar Rp 2.145.460.216,00 menjadi Rp 19.527.741.126,00.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto di Kalimantan Selatan diduga disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

1. Jatuhnya komoditi andalan Kalsel seperti batubara, sawit dan karet yang menyebabkan menurunnya tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
2. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menyebabkan menurunnya tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
3. Tingginya angka pengangguran yang menyebabkan menurunnya tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
4. Rendahnya realisasi pengeluaran pemerintah yang menyebabkan menurunnya tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas Produk Domestik Regional Bruto disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk itu, perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian hanya fokus ke dalam permasalahan yang akan diteliti. Beberapa faktor yang dipilih berdasarkan pada masalah yang masih banyak dialami oleh daerah Kalimantan Selatan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran dan realisasi pengeluaran pemerintah.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat pengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto, yaitu :

1. Terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto
2. Terdapat pengaruh pengangguran terhadap Produk Domestik Regional Bruto
3. Terdapat pengaruh realisasi pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto
4. Terdapat pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran dan realisasi pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoretis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Produk Domestik Regional Bruto di provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan memberikan pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk mengetahui lebih jauh mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, dan realisasi pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto di provinsi Kalimantan Selatan.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto. Selain itu juga memberikan solusi mengenai masalah Produk Domestik Regional Bruto dan fokus kepada faktor-faktor yang harus diperbaiki untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto.